



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pepaya Nomor 67 Telp. (0761) 40311, 40312 Fax 40313e-
mail : dp3ap2kb@riau.go.id / website : dp3ap2kb.riau.go.id

PEKANBARU - RIAU

Kode Pos : 28126

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR:Kpts 021/ I/2025**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK WAJIB DI SEDIAKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Riau tentang Daftar Informasi Publik Wajib Di Sediakan Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id/>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.778/IV/2 020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Wajib Di Sediakan Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang dikecualikan dan informasi yang tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada
tanggal 14 Januari 2025

a.n. Gubernur Riau

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Riau,**



Hj. FARIZA, S.H, M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661226 198701 2 003

Tembusan disampaikan kepada
Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Riau di Pekanbaru.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
SEKRETARIAT						
1	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2025	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan setelah diperbaharui, inaktif 2 tahun, MUSNAH
2	Informasi Peraturan, Keputusan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2023-2025	Cetak	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 3 tahun, Permanen
3	Analisis Jabatan	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2025	link SI-jabpri http://anjab.riau.go.id	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran selesai, inaktif 2 tahun, Permanen
4	Analisis Beban Kerja	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2025	link SI-jabpri http://anjab.riau.go.id	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran selesai, inaktif 2 tahun, Permanen
5	Standar Kompetensi Jabatan	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2025	Soft File	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran selesai, inaktif 2 tahun, Permanen
6	Daftar Urut Kepangkatan	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2025	Cetak	aktif 1 tahun setelah data diperbaharui, inaktif 1 tahun, MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
7	Laporan Keuangan 2023-2024 (Audited)	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Pekanbaru, 2024	Soft File & Buku	2 Tahun Sejak Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Disahkan, inaktif 3 Tahun, Musnah
8	Peraturan Gubernur Riau No. 4 Tahun 2020 tentang : Perubahan atas peraturan Gubernur Riau nomor 58 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Pekanbaru, 2020	Cetak	aktif 1 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 2 tahun, Permananen
9	Laporan BMD Semester I Tahun 2025	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Pekanbaru, 2025	Soft File & Buku	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggungjawabkan, 7 Inaktif, Musnah
10	Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan	Sekretaris	Unit Kearsipan	Pekanbaru, 2024-2025	Cetak	aktif 1 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 1 tahun, MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau 2018-2025	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2018-2025	Soft File	aktif 1 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 1 tahun, PERMANEN
12	Rencana Strategis	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2019-2025	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun, PERMANEN
13	Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2025	Cetak & Soft File	aktif 1 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 1 tahun,
14	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2021-2025	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun, PERMANEN

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
15	DPA Tahun 2023-2025	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2023-2025	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun, PERMANEN
16	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2025	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2021-2025	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun, MUSNAH
17	Rencana Kerja 2021-2025	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2025	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun, PERMANEN
18	Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2021 tentang : Hubungan Kerja Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2021	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
19	Surat Edaran Nomor 153/Se/Bkd/2021 tentang : Penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun tenaga honorer	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2021	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
20	Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, organisasi dan Tata Kerja PD	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2023	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
21	Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang system kerja	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2023	Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG PEMENUHAN HAK ANAK						
22	DATA FORUM ANAK	Kepala Bidang KTRPHA	Fungsional Analis Kebijakan	Pekanbaru, 2024	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI						
23	Jumlah Peserta KB, DATA CPR, NON MKUP, MKUP, UNMET NEED,, POKTANBINA KELUARGA BALITA, POKTAN BINA KELUARGA REMAJA, POKTAN BINA KELUARGA LANSIA, POKTAN PIR-REMAJA, POKTAN UPPKA	Kepala Bidang KSDI	Fungsional Penata KKB	Pekanbaru, 2024	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
24	GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU	Kepala Bidang PPKB	Fungsional Penata KKB	Pekanbaru, 2022	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
BIDANG PERLINDUNGAH HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK						
25	EVALUASI GT PP TPPO	Kepala Bidang PHPKA	Fungsional Analis Kebijakan	Pekanbaru, 2024	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
26	REKAP DRPPA	Kepala Bidang PHPKA	Fungsional Analis Kebijakan	Pekanbaru, 2024	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER						
27	GAP, GBS , KAK	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekanbaru, 2020-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 2 tahun, PERMANEN
28	IPG , IDG	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekanbaru, 2020-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
29	Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengarustaman Gender	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekanbaru, 2014-2025	Soft File, Cetak dan Web	Aktif
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						
30	DATA Kekerasan Perempuan dan Anak	Kepala UPT PPA	Kasubag TU UPT PPA	Pekanbaru, 2020-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI RIAU**



Hj. Fariza, SH., MH
NIP. 19661226 198701 2 003